

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

**OLEH
PUJI SANTOSO**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

**OLEH
PUJI SANTOSO**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

Pada

**Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lmapung**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2016

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan menggunakan sampel sebanyak 141 responden. Metode pengumpulan data menggunakan survey, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas LKPD (2) Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Dengan melakukan penguatan SPIP secara terus-menerus, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas LKPD. (3) Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan maka kualitas LKPD yang dihasilkan cenderung semakin baik. (4) Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka akan mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

ABSTRACT

The Influences of Applications of Government Accounting Standard, Government Internal Controlling System, Human Resource Competence And The Use of Information Technology to The Quality of Regional Government Financial Reports in Lampung Province

The objectives of this research were to test empirically: the influences of applications of government accounting standard, government internal controlling system, human resource competence and the use of information technology to the quality of regional government financial reports. This research was conducted in regional governments of municipals or regencies in Lampung province by using 141 respondent samples. Data were collected with surveys and analyzed with validity and reliability tests. Hypothesis was tested with regression analysis.

The research results showed that (1) the application of government accounting standard influenced positively the regional government financial reports. This proved that the better the government accounting standard application would have positive effect on the improvement of regional government financial reports; (2) the application of government internal controlling system influenced positively the quality of regional government financial reports. Continuous application of government internal controlling system would improve the regional government financial reports; (3) the human resource competence influenced positively the quality of the regional government financial reports. The higher competence of human resource such as educational level, knowledge and skill in drafting financial reports would produce better regional government financial reports; (4) the use of information technology influenced positively the quality of regional government financial reports. Higher use of information technology would accelerate the drafting process and presentation of the regional government financial reports.

Keywords: Quality of regional government financial reports, applications of government accounting standard, government internal controlling system, human resource competence and the use of information technology

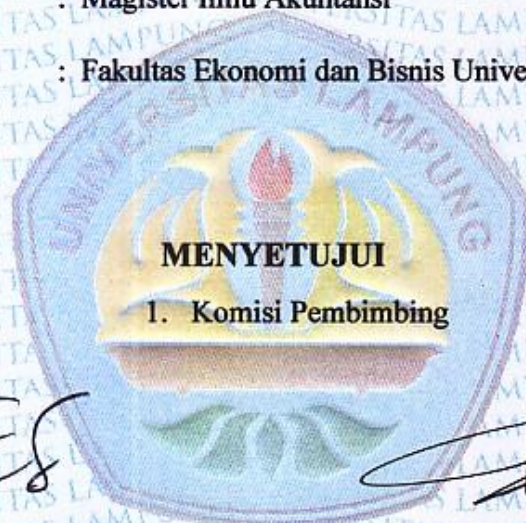
**Judul Tesis : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Puji Santoso

No. Pokok Mahasiswa : 1421031060

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 06 Januari 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Santoso
NIM : 1421031060
Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandar Lampung, Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Puji Santoso
Puji Santoso

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 27 Maret 1982 putra kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Prayitno Bin Suko (Alm) dan Ibu Katemi Binti Mad Abu (Almh). Alamat tempat tinggal sekarang di Perum. Korpri Permai Jl. Sapan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 01 Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir lulus tahun 1994. MTs. Khoerul Ummah Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir lulus tahun 1997. SMU PAS Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir lulus tahun 2000. S1 Ekonomi di STIE Abdi Nusa Palembang lulus tahun 2005

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

Orang yang berguna adalah orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya, kehadirannya selalu diterima dan apabila dia telah tiada orang senantiasa mengenang kebaikannya.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan tesis ini kepada pendamping setia Isteriku Lifianti Indah Lestari, SE serta putra ku Alkhalifi Nurillahi Santoso

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahilalamin Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya. Tesis dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini;
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., A.kt. selaku penguji utama
8. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku sekretaris penguji
9. Bpk Drs. Muhammad Umar, selaku Kepala BKD Kota Bandar Lampung dan seluruh staf bagian keuangan
10. Staf administrasi MIA UNILA Mas Andri Kasrani dan mbk Leni
11. Istri tercinta Lifianti Indah Lestari, S.E., yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam proses penyelesaian tesis ini.

Sebagai penutup Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis

Puji Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS	
.....	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah	12
2.1.3 Teori Kontingensi	14
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	15
2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan ...	18
2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	21
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	25
2.1.8 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	27

2.1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	29
2.1.10 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Penelitian	33
2.3 Pengembangan Hipotesis	34
2.3.1 Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung	34
2.3.2 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung	36
2.3.3 Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung	37
2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Rancangan Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Penentuan Sumber Data	41
3.4.1 Sumber data	41
3.4.2 Populasi dan sampel penelitian	41
3.5 Jenis Data	42
3.5.1 Data Primer	42
3.6 Definisi Operasional	43
3.6.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	43
3.6.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	43

3.6.3 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	44
3.6.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	45
3.6.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	45
3.7 Instrumen Penelitian	46
3.8 Metode Analisa Data	50
3.8.1 Uji Validitas	50
3.8.2 Uji Reabilitas	50
3.9 Uji Hipotesis	51
3.9.1 Nilai R^2 (Koefisien Determinan)	51
3.9.2 Uji F	52
3.9.3 Uji t	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung	54
4.2 Diskripsi Data	55
4.3 Profil Responden	55
4.4 Hasil Penelitian	56
4.4.1 Uji Validitas Instrumen	56
4.4.1.1 Uji Validitas untuk Variabel Penerapan SAP	57
4.4.1.2 Uji Validitas untuk Variabel Penerapan SPIP	58
4.4.1.3 Uji Validitas untuk Variabel Kompetensi SDM	58
4.4.1.4 Uji Validitas untuk Variabel Pemanfaatan TI	59
4.4.1.5 Uji Validitas untuk Variabel Kualitas LKPD	59

4.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen	60
4.4.2.1 Uji Reliabilitas Variabel Penerapan SAP	60
4.4.2.2 Uji Reliabilitas Variabel Penerapan SPIP	61
4.4.2.3 Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi SDM	61
4.4.2.4 Uji Reliabilitas Variabel Teknologi Informasi	62
4.4.2.5 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas LKPD	62
4.4.3 Statistik Deskriptif	63
4.4.3.1 Pernyataan responden tentang variabel penerapan SAP	63
4.4.3.2 Pernyataan responden tentang variabel penerapan SPIP	64
4.4.3.3 Pernyataan responden tentang variabel kompetensi SDM	65
4.4.3.4 Pernyataan responden tentang variabel pemanfaatan TI	66
4.4.3.5 Pernyataan responden tentang variabel kualitas LKPD	67
4.4.4 Analisis Kuantitatif	68
4.4.4.1 Perhitungan Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD di Provinsi Lampung	68
4.4.4.2 Perhitungan Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kualitas LKPD	70
4.4.4.3 Perhitungan Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD	71
4.4.4.4 Perhitungan Pengaruh Pemanfaatan TI (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	73
4.4.5 Analisis Regresi Linier antara penerapan SAP (X_1), penerapan SPIP (X_2), kompetensi SDM (X_3) dan pemanfaatan TI (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	74
4.4.6 Uji Simultan	76
4.4.7 Pembahasan	77

4.4.7.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung	77
4.4.7.2 Pengaruh Penerapan SPIP (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)	77
4.4.7.3 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	78
4.4.7.4 Pengaruh Pemanfaatan TI (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Opini (Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung) tahun 2010-2014	3
2. Daftar Penelitian Terdahulu	30
3. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala pengukuran	47
4. Interpretasi Koefisien Korelasi	52
5. Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung	54
6. Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner	55
7. Profil responden meliputi jenis kelamin, Jabatan, Pendidikan	55
8. Uji Validitas Penerapan SAP	57
9. Uji Validitas Penerapan SPIP	58
10. Uji Validitas Kompetensi SDM	58
11. Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	59
12. Uji Validitas Kualitas LKPD	59
13. Uji Reliabilitas Variabel Penerapan SAP	60
14. Uji Reliabilitas Variabel Penerapan SPIP	61
15. Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi SDM	61
16. Uji Reliabilitas Variabel Teknologi Informasi	62
17. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas LKPD	62
18. Statistik deskriptif variabel penerapan SAP	63
19. Statistik deskriptif variabel penerapan SPIP	64
20. Statistik deskriptif variabel kompetensi SDM	65
21. Statistik deskriptif variabel pemanfaatan TI	66
22. Statistik deskriptif variabel kualitas LKPD	67
23. Tabel Perhitungan tentang Korelasi Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan dari 141 responden	68
24. Koefisien Determinasi Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69

25. Uji Hipotesis Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69
26. Koefisien Determinasi Penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	70
27. Uji Hipotesis Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	71
28. Koefisien Determinasi Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	72
29. Uji Hipotesis Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72
30. Koefisien Determinasi Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	73
31. Uji Hipotesis Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
32. Analisis Regresi Linier penerapan SAP (X_1), penerapan SPIP (X_2), kompetensi SDM (X_3) dan pemanfaatan TI (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	74
33. Perhitungan Regresi Ganda antara penerapan SAP (X_1) Penerapan SPIP (X_2), kompetensi SDM (X_3) dan pemanfaatan TI (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	75
34. Hasil Uji F	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Daftar persentase Opini sepuluh Provinsi se-Pulau Sumatera tahun 2010 -2014.....	2
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	13
3. Kerangka Konsep Penelitian	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (PP 71, Tahun 2010).

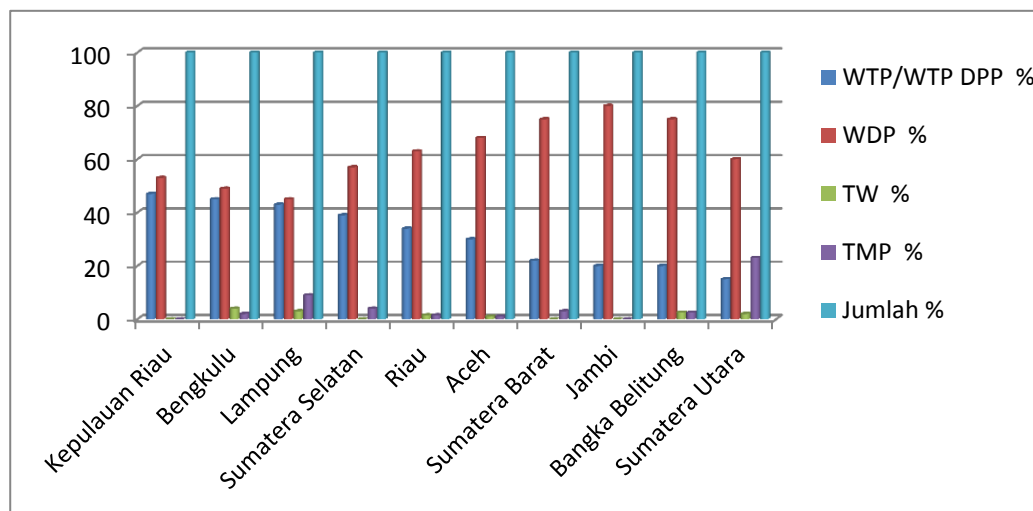
Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif sedikit (Sudiarianti, 2015). Masih sedikitnya LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD masih dibawah target Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014 (IHPS I BPK RI, Tahun 2015).

Dari data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 atas 504 LKPD kabupaten/Kota tahun 2014 menunjukkan opini WTP diberikan atas 251 entitas termasuk entitas dengan opini WTP-Dengan Paragraf Penjelas (DPP) (40,89%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 230 entitas (45,64%), opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas (0,79%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 19 entitas (3,77%). Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015 atas opini LKPD tahun 2010-2014 pada sepuluh pemerintah daerah provinsi se-pulau Sumatera menunjukkan hasil sebagai berikut :

Gambar 1. Daftar persentase Opini sepuluh Provinsi se-Pulau Sumatera tahun 2010 -2014



Sumber : IHPS I BPK RI, Tahun 2015

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa opini LKPD di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau sumatera masih dibawah Provinsi Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hasil audit pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014 menunjukkan masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masih mendapatkan opini WDP, TW dan TMP seperti terlihat dalam Tabel 1 (satu) sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Opini (Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung) tahun 2010 s.d 2014

No	Entitas	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Prov. Lampung	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP	WTP-DPP
2	Lampung Barat	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
3	Lampung Selatan	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP
4	Lampung tengah	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
5	Lampung Timur	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
6	Lampung Utara	TMP	WDP	TW	TW	WDP
7	Mesuji	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
8	Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Pesisir Barat	-	-	-	-	TMP
10	Pringsewu	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP
11	Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Tulang bawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
13	Tulang Bawang Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Bandar Lampung	WTP	WTP-DDP	WTP	WTP	WTP
16	Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK RI, IHPS 1 Tahun 2015

Dari Tabel 2. persentase opini LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014 dari hasil audit pemeriksaan BPK 43% memperoleh opini WTP, 45% memperoleh opini WDP, 3% memperoleh opini TW dan 9% memperoleh opini TMP.

Adapun yang menjadi penyebab Laporan LKPD masih mendapatkan opini WDP, TMP yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2014 antara lain (1) Kas digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kas dibendahara pengeluaran tidak dalam penguasaan bendahara, kas pada akhir tahun belum disetor ke kas daerah, yaitu yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pringsewu dan Pesisir barat. (2) Tidak dapat dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dan penyajian persediaan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan hal ini terjadi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. (3) Penyajian saldo investasi permanen penyertaan modal pemerintah tidak memiliki bukti yang jelas dan kuat. Bentuk penyaluran dana Pemerintah Daerah yang tidak jelas dijadikan tambahan penyertaan modal atau pinjaman, seperti yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. (4) Aset tetap tidak diketahui keberadaanya atau telah dikuasai oleh pihak lain, tidak didukung oleh bukti kepemilikan, penghapusan dan penyusutanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pelaporan aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan tidak ada rekonsiliasi serta tidak dilakukan inventarisasi yang memadai hal ini terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu dan Pesisir Barat. (5) Pada belanja barang dan jasa, pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pada belanja modal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan indikasi kerugian negara.

Sementara itu pada belanja subsidi dan bantuan sosial, realisasi belanja tidak sesuai dengan usulan dan tidak didukung dengan laporan pertanggungjawaban seperti yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran dan Pesisir Barat (IHPS I BPK, Tahun 2015).

Hal ini memberikan informasi bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih kurang baik. Lemahnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang belum optimal diduga sebagai faktor penyebab tidak tercapainya opini WTP seperti yang ditargetkan pemerintah.

Penerapan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia. Penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Implementasi SAP berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar (Mahaputra dan Putra, 2014). Efektivitas penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ningtyas dan Widyawati, 2015). Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Fachruzamman (2013), menunjukkan bahwa pemahaman SAP tidak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Fikri dkk, 2015).

Pengendalian internal dibangun dari lima komponen sebagai berikut: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; serta (e) pemantauan. (PP Nomor 60 tahun 2008; Arens, 2014:345). Laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus berdasarkan SPIP yang memadai dan sesuai dengan SAP. Semakin baik penerapan SPIP maka kualitas LKPD juga akan semakin meningkat (Irwan, 2011). Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar (Mahaputra dan Putra, 2014). Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti dkk, 2014) Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmila dkk (2014), menunjukkan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap LKPD. Sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014) Tidak terdapat pengaruh pemahaman sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara langsung (Manaf dkk, 2014).

Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014). Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008) Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik Kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014). Hasil penelitian yang belum mendukung adalah penelitian Karmila, Tanjung, Darlis (2014) memberikan bukti empiris bahwa kapasitas SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena kondisi SDM di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum mendukung. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD (Syaripudin, 2014) Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. (Fikri, Inapty, Martiningsih, 2015)

Teknologi informasi meliputi computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk

mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Jurnal dan Supomo (2002) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Darwanis dan Mahyani, 2009). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Karmila dkk, 2014). Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian Prpto, (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, penggunaan jaringan internet yang belum optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal. (Anggraeni dan Riduan, 2014). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang (Setyowati dan Isthika, 2014).

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan diatas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara temuan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang mengacu pada penelitian Irwan (2011). Perbedaanya adalah penulis menambahkan satu variabel independen, memperluas objek peneltian dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan penerapan SAP, penerapan SPIP, kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen, serta Kualitas LKPD sebagai variabel dependen, menggunakan kasubbag keuangan, kasubbag akuntansi dan pelaporan, bendahara pengeluaran dan staf pada BPKAD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebagai responden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
4. Apakah Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
4. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung didalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan peningkatan kualitas LKPD
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang peningkatan Kualitas LKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Asimetri informasi (*asymmetric information*) merupakan informasi yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Gibaldi, 2001).

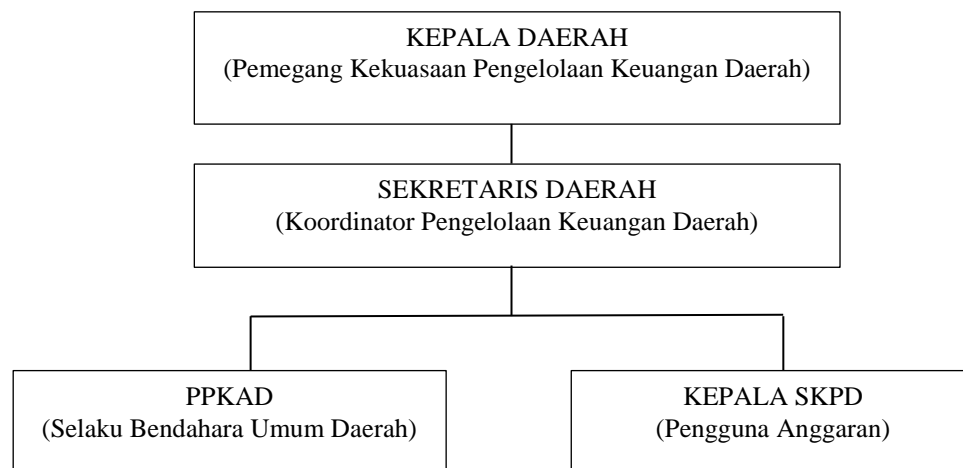
Mardiasmo (2007: 20-21) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.1.2 Hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah

Gilardi (2001) mengemukakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai hubungan pendelegasian. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, SKPKD dan SKPD. Hubungan kepala daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPKD sebagai agen menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku PPKD. Kedudukan Pejabat PPKD adalah menerima wewenang dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (PP Nomor 71, Tahun 2010).

Hubungan pendelegasian antara kepala Daerah dengan SKPKD dan SKPD dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: Permendageri Nomor 13 Tahun 2006

PPKD memiliki tugas untuk: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; (2) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; (3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; (4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); serta (5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas : (1) menyelenggarakan penatausahaan atas pertanggungjawaban anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; (2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, serta (3) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

2.1.3 Teori Kontingensi

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanya efektif untuk situasi organisasi atau pemerintahan tertentu (Outley, 1980). Teori kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut Stoner (1996:47) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda.

Munculnya teori kontingensi dalam akuntansi pemerintahan berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan, serta menyediakan dasar untuk kontrol terhadap keuangan pada kegiatan pemerintah (Kristiawati, 2015).

Kondisi penerapan SPIP pada organisasi pemerintah sangat bergantung kepada komitmen dan keteladanan pimpinan. Pimpinan yang bisa menciptakan kepercayaan bawahannya akan membuat perintahnya dipatuhi. Selain itu, penerapan SPIP juga bergantung pada pengetahuan Pegawai tentang apa sebenarnya SPIP itu sendiri. Tujuan penggunaan pendekatan kontingensi adalah untuk mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan hasil antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga disimpulkan terdapat variabel lain yang mempengaruhinya. Dengan demikian melalui pendekatan kontingensi penelitian ini mengargumenkan keberhasilan penerapan SAP dan SPIP untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Shahwan (2008) menyatakan bahwa tujuan dasar dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menekankan bahwa informasi yang disajikan dapat berguna jika laporan keuangan menunjukkan realitas ekonomi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

1. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan informasi bahwa laporan keuangan Pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Bastian, dalam Forum Dosen Akuntansi Publik (2006) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai Akuntansi Pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Betapapun bagusnya Standar Akuntansi Pemerintahan, tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit untuk dicapai.

Arens (2014:340) menyebutkan bahwa tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang meliputi antara lain menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian internal tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam (Indriasari dan Nahartyo, 2008) untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Byars dan Rue (1997) kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatannya dengan baik atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja.

Menurut Wyatt dalam Ruky (2003), Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, dalam Indriasari dan Ertambang, 2008). Menurut Indriasari dan Ertambang, (2008) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah

Penerapan SAP, sistem SPIP, Kompetensi SDM serta pemanfaatan teknologi Informasi.

2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 6 (Akuntansi Investasi)

Dengan menggunakan metode biaya investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian dengan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan, untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan)

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban)

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

10. PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan)

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

11. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

12. PSAP No. 12 (Laporan Operasioanl)

Laporan Operasional memnyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Arens (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan tentang beberapa poin penting antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Pemantauan pengendalian intern.
5. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui (a) penegakan integritas dan nilai etika (b) komitmen terhadap kompetensi (c) kepemimpinan yang kondusif (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Irwan, 2011).

2.1.8 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Watson Wyatt sebagaimana dikutip Ruky (2003) kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Dengan demikian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi permasalahan, yang dapat diukur dari kemampuannya untuk menjadi pelaku kinerja yang efektif.

Boyatzis dalam Hutapea dan Thoha (2008) kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang biasa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku, yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya (Safri, 2002). Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS yang menyebutkan bahwa: "Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, efektif dan efisien".

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014). Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014).

2.1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Salah satu teori yang digunakan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai penggunaan teknologi adalah TAM (*Technology Acceptance Model*). TAM berteorikan bahwa niat seseorang untuk menggunakan sistem atau teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), adalah tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), adalah tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi membuatnya lebih mudah menyelesaikan pekerjaan (Davis, 1989).

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Menurut Indriasari dan Ertambang (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nugraheni dan Subaweh, (2008)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan

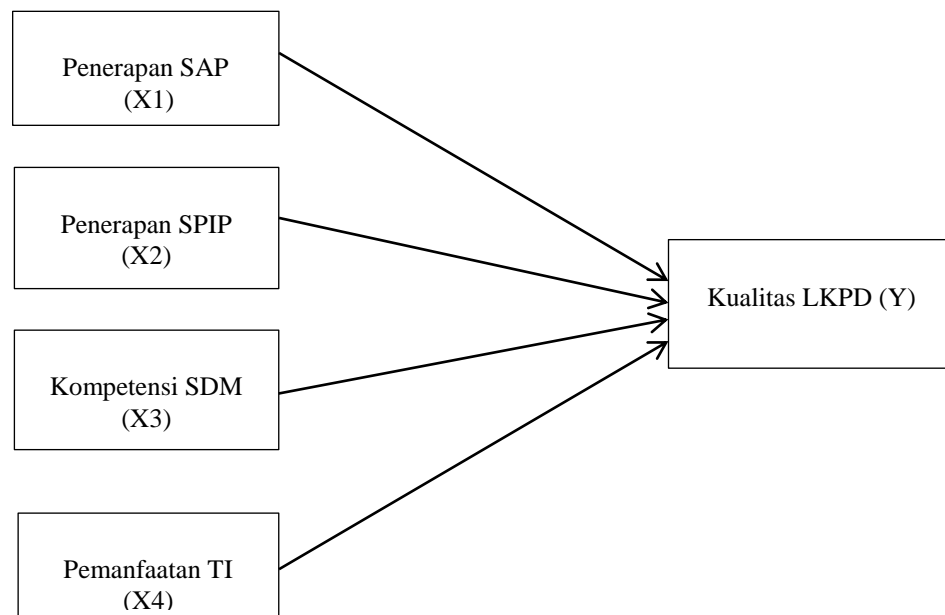
- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Darwanis dan Mahyani, (2009) | Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3. Hasil menunjukkan pengendalian intern akuntansi memiliki korelasi positif dan memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. |
| Irwan, (2011) | Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 2. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 3. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. |
| Karmila, Tanjung dan Darlis, (2014) | Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah provinsi Riau) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. 3. Pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. |

Mahaputra dan Putra, (2014)	Analisis faktor - faktor yang memengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. 2. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar 3. Sitem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. 4. implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.
Angraini dan Riduan, (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
Ningtyas dan Widyawati, (2015)	Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Penelitian

Kualitas LKPD yang baik memerlukan adanya pedoman dalam proses penyusunannya. SAP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan LKPD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dengan demikian SAP mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SPIP merupakan suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas LKPD yang berkualitas tidak akan bisa tercapai tanpa adanya SPIP yang baik. Kopetensi SDM merupakan faktor penting di dalam penyusunan LKPD, pemerintah daerah sangat membutuhkan pegawai yang mempunyai kopetensi dan keunggulan individu didalam melaksanakan tugas berdasarkan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Kopetensi SDM sangat penting didalam Penerapan SPIP yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dihasilkan LKPD yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang dalam proses pengolahan data, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara komputerisasi sehingga dapat menghasilkan kualitas LKPD. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 3 Kerangka Konsep Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya secara statistik. Penelitian ini ingin membuktikan penerapan SAP, SPIP, kompetensi SDM, dan Pemanfaatan teknologi informasi yang diduga berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung. Perumusan hipotesis penelitian berdasarkan urutan-urutan variabel adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2010:22-23).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan informasi bahwa laporan keuangan Pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian (Nugraheni dan Subaweh, 2008) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum diterapkan SAP laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 belum dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan namun setelah diterapkannya SAP maka laporan keuangan tahun berikutnya telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Irwan, 2011). Penerapan SAP oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011). Efektivitas penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ningtyas dan Widyawati, 2015). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Penerapan SAP terhadap kualitas LKPD sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung.

2.3.2 Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Fungsi SPIP tentang lingkungan pengendalian terdiri atas (1) Reviu atas kinerja yang bersangkutan (2) Pembinaan sumber daya manusia (3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi (4) Pengendalian fisik atas aset (5) Pemisahan fungsi (6) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting (7) akuntabilitas terhadap sumber daya (8) Dokumentasi yang baik atas transaksi. Sehingga kualitas laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 60 tahun 2008). Semakin baiknya penerapan SPIP maka kualitas LKPD juga akan semakin meningkat (Irwan, 2011). Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar (Mahaputra dan Wayan Putra, 2014). Penerapan SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan (Sudiaranti, 2015). Pengendalian intern akuntansi memiliki korelasi positif dan memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Darwanis dan Mahyani, 2009). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara SPIP terhadap kualitas LKPD maka penulis mengajukan hipotesis:

H_2 : SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung.

2.3.3 Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena yang menjalankan SAP dan SPIP adalah sumber daya manusia. Sebaik apapun sistem dan peraturan yang dibuat tapi jika Kompetensi SDM yang menjalankan kurang memadai maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan (Irwan 2011). Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Penelitian mengenai Kompetensi SDM, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah juga pernah dilakukan oleh Indriasih (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD maka penulis mengajukan hipotesis:

H₃ : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung.

2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Lampung.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil putusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Menurut Jurnal dan Supomo (2002) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan

tugas. Penelitian Darwanis dan Mahyani (2009) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki korelasi positif dan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan hipotesis:

H_4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan mengukur dan menganalisis pengaruh penerapan SAP, penerapan SPIP, kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD. Penelitian ini dilakukan pada BPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penetapan hipotesis yang mengacu pada kajian teoretis dan empiris merupakan langkah selanjutnya. Variabel-variabel penelitian yang dihasilkan dari hipotesis tersebut dilengkapi dengan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian untuk mencari pengaruh antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, variabel independen adalah SAP, penerapan SPIP, Kompetensi SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel dependen adalah kualitas LKPD. Penelitian ini dilakukan pada BPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada BPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

3.4 Penentuan Sumber Data

3.4.1 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan bantuan instrumen kuesioner.

3.4.2 Populasi dan sampel penelitian

Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. (Sugiyono 2016: 61) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 entitas pelaporan dan dalam hal ini adalah BPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. (Sugiyono, 2016:62). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau dengan pertimbangan (*judgement*) tertentu (Sugiyono, 2016:67). BPKAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 15 dan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi yang dijadikan sampel. Dari masing-masing BPKAD dan Biro Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dipilih 9 pegawai untuk dijadikan sebagai responden yaitu kasubbag keuangan, kasubbag akuntansi dan pelaporan, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf pada masing-masing bagian tersebut, sehingga total responden berjumlah 144 orang.

3.5 Jenis Data

3.5.1 Data Primer

Data primer diperoleh peneliti langsung dari responden yaitu kasubbag keuangan, kasubbag akuntansi dan pelaporan, Bendahara Pengeluaran dan Staf pada BPKAD dan Biro Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung melalui penyebaran kuesioner penelitian. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai kualitas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, penerapan SAP, SPIP, kompetensi SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)

Kualitas LKPD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 tahun 2010, yang diukur melalui skala likert lima dimensi dan indikator diperoleh dari PP Nomor 71 tahun 2010; Irwan (2011), Sudiarianti (2015). yaitu:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan
- d) Dapat dipahami

3.6.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X₁)

Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh PPK dan Bendahara pengeluaran didalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 12 pernyataan standar. Adapun dimensi dan indikator diperoleh dari PP 71 tahun 2010; Irwan (2011), Sudiarianti (2015). Yaitu :

- a) PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan.
- b) PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran.
- c) PSAP No. 03 tentang laporan arus kas.
- d) PSAP No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan.
- e) PASP No. 05 tentang akuntansi persediaan.
- f) PSAP No. 06 tentang akuntansi investasi.
- g) PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

- h) PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
- i) PSAP No. 09 tentang akuntansi kewajiban.
- j) PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan.
- k) PSAP No.11 tentang laporan keuangan konsolidasi.
- l) PSAP No.12 tentang laporan Operasional.

3.6.3 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X₂)

Penerapan SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dimensi dan indikator dari variable penerapan SPIP ini diukur dengan skala likert lima yang diperoleh dari PP Nomor 60 Tahun 2008; Irwan (2011), Sudiarianti (2015). yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian.
- b) Penilaian risiko.
- c) Aktivitas pengendalian.
- d) Informasi dan komunikasi.
- e) Pemantauan.

1.6.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X₃)

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas jabatan melalui skala likert lima yang dimensi dan indikatornya diperoleh dari Wayat dalam Ruky (2003); Irwan (2011), Sudiarianti (2015) sebagai berikut:

- a) Pengetahuan (*Knowledge*) adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya.
- b) Keterampilan (*Skill*) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah secara maksimal.
- c) Perilaku (*Attitude*) adalah pola tingkah laku PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

1.6.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₄)

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000). Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jurnali dan Supomo, 2002). Konstruk

Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan dimensi dan indikator melalui skala likert lima yang diperoleh dari Jurnal & Supomo (2002) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) sebagai berikut:

- a) Perangkat yang dimaksud disini adalah ketersediaan komputer dan jaringan internet dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
- b) Pengelolaan data keuangan yang dimaksud adalah Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi dan Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan (*software*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Perawatan pada peralatan yang dilakukan secara teratur.

3.7 Instrumen Penelitian

Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, berdasarkan pembatasan masalah dan kajian teoritis sebelumnya, maka dapat ditentukan indikator variabel (Arikunto, 2010:15) Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir item pernyataan.

Indikator variabel dependen (Y) diperoleh dari PP Nomor 71 tahun 2010), data variabel independen X_1 diperoleh dari dari PP No 71 tahun 2010, Irwan (2011), Sudiarianti (2015), tentang SAP. untuk variabel independen X_2 diperoleh dari dari PP Nomor 60 Tahun 2008, Irwan (2011), Sudiarianti (2015), tentang SPIP, untuk variabel independen X_3 di peroleh dari Wayat dalam Ruky (2003), Irwan (2011), Sudiarianti (2015) sedangkan variabel independen X_4 diperoleh dari Jurnal dan Supomo (2002) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008). Item

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing- masing variabel penelitian sebagian telah dimodifikasi dan dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Skala	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan	1. Manfaat umpan balik 2. Manfaat prediktif 3. Tepat waktu 4. Lengkap	A 1-4	Skala Likert 1-5	Item pertanyaan nomor 5,6,7,8,9, dan 10 telah dimodifikasi
	2. Andal	5. Penyajian laporan keuangan yang jujur 6. Bebas dari kesalahan yang bersifat material 7. Netralitas	A 5-7		karena peneliti ingin lebih menekankan pada entitas pelaporan sedangkan pada item pertanyaan penelitian sebelumnya lebih kepada entitas akuntansi
	3. Dapat dibandingkan	8. Secara internal 9. Secara eksternal	A 8-9		
	4. Dapat dipahami	10. Dapat dipahami oleh pengguna	A 10		
Penerapan SAP (X ₁)	(PP No 71 Tahun 2010), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)	(PP No 71 Tahun 2010), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)			
	1. Penyajian laporan keuangan.	1. Basis akrual	B 1	Skala Likert 1-5	- Item pertanyaan nomor 1,2,4,5, 10,11 telah dimodifikasi
	2. Laporan realisasi anggaran.	2. Penyajian laporan realisasi anggaran 3. Pengakuan belanja	B 2-3		karena peneliti ingin lebih menekankan pada entitas pelaporan
	3. Laporan arus kas.	4. Aktivitas operasi	B 4		- Item pertanyaan nomor 8 mengenai aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, jika tidak memungkinkan dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan
	4. Catatan atas laporan keuangan.	5. Penyajian informasi secara lengkap mengenai pos-pos dalam laporan keuangan	B 5		
	5. Akuntansi persediaan.	6. Pengakuan persediaan	B 6		
	6. Akuntansi investasi.	7. Pengakuan investasi	B 7		
7. Akuntansi aset tetap	8. Penilaian aset tetap 9. Perlakuan akuntansi	B 8			

	8. Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan.	kontruksi	B 9	- Penambahan item pertanyaan nomor 13 karena pada penelitian sebelumnya belum memasukan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional
	9. Akuntansi kewajiban	10. Pengakuan kewajiban	B 10	
	10. Koreksi kesalahan	11. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan	B 11	
	11. Laporan keuangan konsolidasian	12. Penyajian laporan keuangan konsolidasi	B 12	
	12. Laporan operasional	13. Penyajian laporan operasional	B 13	
	(PP No 71 Tahun 2010), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)	(PP No 71 Tahun 2010), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)		
Penerapan SPIP (X2)	1. Lingkungan Pengendalian	1. Penegakan nilai integritas dan etika 2. Komitmen terhadap Kompetensi pegawai	C 1-2	Skala Likert 1-5 - Item pertanyaan nomor 1 telah dimodifikasi karena adanya penegakan nilai etika yang tepat sangat diperlukan. - Item pertanyaan nomor 2 telah dimodifikasi karena karena pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
	2. Penilaian Risiko	3. Analisis resiko 4. Identifikasi resiko	C 3-4	
	3. Aktivitas Pengendalian	5. Kebijakan dan mekanisme pengendalian 6. Pengembangan kegiatan pengendalian	C 5-6	
	4. Informasi dan Komunikasi	7. Informasi operasional dan keuangan 8. Implementasi sistem informasi	C 7-8	
	5. Pemantauan	9. Prosedur tindak lanjut dari hasil temuan 10. Temuan dievaluasi, ditanggapi dan dilaksanakan	C 9-10	
	(PP No. 60 Tahun 2008) Irwan (2011), Sudiarianti (2015)	(PP No. 60 Tahun 2008) Irwan (2011), Sudiarianti (2015)		

Kompetensi SDM (X3)	1. Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tugas pokok sesuai dengan fungsi 2. Pengetahuan tentang siklus akuntansi 3. Pengetahuan tentang peraturan yang telah ditetapkan 	D 1-3	<p>Skala - Item pertanyaan Likert nomor 3 telah dimodifikasi karena peneliti mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan PP nomor 24 tahun 2005</p> <p>- Item pertanyaan nomor 4 telah dimodifikasi karena peneliti ingin lebih menekankan pemahaman tentang komponen laporan keuangan</p>
	2. Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan 5. Pendidikan dan pelatihan 	D 4-5	
	3. Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengedepankan etika dalam bekerja 7. Menolak terhadap intervensi yang dapat menimbulkan pelanggaran 	D 6-7	
	Wayat dalam Ruky (2003), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)	Wayat dalam Ruky (2003), Irwan (2011), Sudiarianti (2015)		
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	1. Perangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan internet terpasang dan berfungsi 2. Pemanfaatan jaringan internet 3. Komputer cukup memadai 	E 1-3	<p>Skala Penambahan item Likert pertanyaan nomor 4 tentang pedoman dan prosedur pemanfaatan teknologi informasi.</p>
	2. Pengelolaan data keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman dan prosedur pemanfaatan teknologi 5. Pemanfaatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan 6. Komputerisasi proses akuntansi 7. Integrasi sistem informasi dan laporan Managerial 	E 4-7	
	3. Perawatan	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pemeliharaan peralatan teknologi informasi 9. Pendataan peralatan dan waktu perbaikan 	E 8-9	
	Jurnali dan Supomo, (2002) Indriasari dan Nahartyo, (2008)	Jurnali dan Supomo, (2002) Indriasari dan Nahartyo, (2008)		

Untuk pernyataan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan kualitas laporan keuangan pemerintah menggunakan alternatif jawaban yang sama yaitu: 5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Netral (N), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).

3.8 Metode Analisa Data

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2001).

3.8.2 Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2001), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.9 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien regresi
X_1	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
X_2	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
X_3	= Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
X_4	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
e	= <i>Error</i>

Sementara itu langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji koefisien determinasi (R^2), Uji -F dan Uji-t

3.9.1 Nilai R^2 (Koefisien Determinan)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model, dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali, 2007)

Pedoman untuk memberikan interpretasi atas koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2016)

3.9.2 Uji F

Uji *F* ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut : Jika signifikansi ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : ditolak) signifikansi ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : diterima), disini p (probabilitas) = F dan Jika H_0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.9.3 Uji t

Uji *t* ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut :

Jika : signifikansi ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : ditolak) signifikansi ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_0 : diterima), p (probabilitas) = t Jika H_0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan SAP, penerapan SPIP, kompetensi SDM, dan pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Semakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas LKPD terutama di Provinsi Lampung.
2. Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan efektifitas SPIP secara terus-menerus dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD.
3. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah tersedianya SDM yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, keahlian ini dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan khususnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD di Provinsi Lampung. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka akan mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah daerah. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat lebih akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi dan BPKAD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sehingga hasil penelitian yang bersifat umum, perlu dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yang lebih besar.
2. Masih sedikitnya jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden.
3. Item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian terlalu banyak, ambigu, dan terdapat beberapa pertanyaan yang mempunyai maksud yang sama sehingga dapat menimbulkan kurang keseriusan responden dalam menyatakan jawaban.
4. Masih lemahnya pengetahuan dan keahlian responden di beberapa instansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, hal ini disebabkan pendidikan dan pelatihan yang belum berkelanjutan, masih lemahnya pemahaman terhadap SAP, masih banyaknya pegawai yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi.

5. Dalam pengujian validitas instrumen peneliti masih menggunakan program SPSS, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan program lain yang lebih tepat untuk mengolah data yang sifatnya variabel laten.

5.3 Saran

1. Diharapkan bagi pegawai BPKAD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terutama pegawai yang bertugas atau terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan agar dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang SAP, peningkatan kompetensi SDM yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Bagi pemerintah daerah perlu menempatkan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan.
3. Perlu diperbanyak pengadaan belanja modal berupa komputer/jaringan, baik itu *hardware* maupun *software*, untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah atas teknologi informasi sebagai akses sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D.T. dan Riduan, A. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.3 No.3
- Arens, A.A, Elder R.J, dan Beasley, M.S. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelima Belas Jilid 1. Alih Bahasa: Herman Wibowo dan Tim Perti. 2014 Jakarta : Erlangga
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Semester I Tahun 2014
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Byars, L, dan Rue, L.W. 1997. *Human Resources Management*, 5th Ed, Irwin, Chicago. Flippo, Edwin B.(1982), *Personnel Management*, McGraw-Hill, USA.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D. 2009. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol 2 No 2 Juli 2009 Hal 133-151
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13, 319-340.
- Fikri, Inapty dan Martiningsih, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *Simporsium Nasional Akuntansi 18* Universitas Sumatera Utara Tahun 2015
- Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference*, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Harahap Sofyan Safri, 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutapea, Parulin dan Nuriana, Thoha. *Kompetensi Plus Teori, Desain Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. 2008. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Indriasari, desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir) *Jurnal SNA Pontianak*.
- Irwan, D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Penerbit Andi : Jogjakarta.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
- Karmila. Tanjung, A.R. dan Darlis, E. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vol. 9 No.1 Lembaga Penelitian Universitas Riau.ISSN 1907-364X
- Kristiawati, Endang. 2015 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas* Vol. III No.3 Desember 2015 Universitas Panca Bhakti Pontianak. ISSN 1979-858X
- Mahaputra, Rahma Upabayu I.P. dan Putra, I.W. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana 8.2 (2014) 230-244
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

- Manaf, Arfan dan Darwanis. 2014. Pengaruh pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 No.4 ISSN 2302-0164
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
- Ningtyas, Eka Pravitasari dan Widyawati, Dini. 2015. Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.4 No1
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13, April 2008, hal 48-58
- Otley, DT, 1980, The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting and Organization Society* 5(4) 413-428
- Prpto. 2010 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2003. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (KKBKN) Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
- Ruki. Ahmad.S. 2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setyowati dan Isthika. 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Proceedings SNEB 2014*
- Shahwan, Yousef 2008 Qualitative Characteristics of Financial Reporting: A Historical Perspective. *Journal of Applied Accounting Research*. 9 (3), pp. 192-202
- Siahaan dan Fachruzamman, 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanggerang. Universitas Bina Nusantara.
- Sudiarianti, M.N. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Thesis*. Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Stoner J.A.F. 1996. *Manajemen*. Alih Bahasa: Alexander Sindoro dan Bambang Sayaka. Jakarta : PT. Prenhalindo
- Syaripudin, 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Fokus Bisnis* Vol.14 No.02 Tahun 2014

- Udiyanti, Atmadja dan Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2 No 1 Tahun 2014
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37